

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 di SMA Negeri 13 Jakarta dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jenis penghasilan apa saja yang diterima oleh para penerima penghasilan, dan juga hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan selama menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan cara mempelajari berbagai macam sumber literatur dan wawancara langsung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa sistem pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi terdapat kesalahan saat menentukan batas PTKP yang digunakan untuk penghitungan pada wanita kawin. Dalam hal penyetoran terdapat keterbatasan data sehingga tidak dapat disimpulkan apakah penyetoran yang dilakukan oleh bendahara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara tidak melakukan pelaporan karena hal tersebut menurutnya bukan merupakan kewajibannya. Tidak terdapat hambatan ataupun gangguan selama menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PTKP, Bendahara, SMA Negeri 13 Jakarta

ABSTRACT

This research discusses the review of the implementation of tax obligations of ITA 21 at Senior High School 13 Jakarta with the aim of knowing whether the ITA 21 withholding system carried out by the Treasurer is in accordance with applicable regulations, what types of income received by income recipients, and also the obstacles and efforts made to overcome obstacles while carrying out ITA 21 tax obligations. The research methods used in this research are library research methods and field research methods by studying various kinds of literature sources and direct interviews. Based on the research conducted, it is found that the Income Tax Article 21 withholding system carried out by Bendahara is in accordance with applicable regulations, but there is an error when determining the PTKP limit used for calculating married women. In terms of depositing there are data limitations so that it cannot be concluded whether the deposits made by the treasurer are in accordance with applicable regulations. The treasurer does not report because he thinks it is not his obligation. There are no obstacles or disturbances while carrying out the tax obligations of Income Tax Article 21.

Keywords: Income Tax Article 21, PTKP, Treasurer, Senior High School 13 Jakarta